

**PERAN BAWASLU DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN DAN
PENEGAKAN PELANGGARAN HUKUM PIDANA PEMILIHAN UMUM**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 17/Pid.Sus/2019/PN Amlapura)

Oleh

I Kadek Pradhita Ciwa Radhitya, NIM 2114101082

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai Peran Bawaslu Dalam Melaksanakan Pengawasan Dan Penegakan Pelanggaran Hukum Pidana Pemilihan Umum (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Amlapura). Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui Bagaimana peran bawaslu dalam upaya pencegahan pelanggaran kode etik dan netralitas (2) Mengetahui Bagaimana mekanisme proses penanganan pelanggaran kode etik terkait netralitas kepala desa di Kabupaten Karangasem melalui fungsi pengawasan Bawaslu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif dengan menggunakan data primer melalui penelitian dengan cara observasi dan wawancara dan juga menggunakan data sekunder menggunakan undang-undang dan dokumen tertentu. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu (1) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran yang sangat penting, hal itu dikarenakan Bawaslu merupakan pilar krusial dalam sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Bawaslu memastikan proses pemilu berjalan sesuai asas demokratis, adil, dan transparan melalui pengawasan sistematis terhadap netralitas ASN dan kepatuhan peserta pemilu terhadap kode etik (2) Bawaslu memiliki kewenangan baru sebagai lembaga pengawas pemilu untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi dan sengketa yang terkait dengan pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif) yang secara administratif dapat membatalkan pencalonan melalui proses sidang adjudikasi.

Kata Kunci: Bawaslu, Pengawasan, Pelanggaran Pidana dan Kode Etik.

***THE ROLE OF THE Election Supervisory Agency (BAWASLU) IN
IMPLEMENTING THE SUPERVISION AND ENFORCEMENT OF CRIMINAL
LAW VIOLATIONS DURING THE GENERAL ELECTION
(STUDY OF DECISION NUMBER 17/Pid.Sus/2019/PN Amlapura)***

By

I Kadek Pradhita Ciwa Radhitya, NIM 2114101082

Law Studies Program

ABSTRACT

This study discusses the Role of Bawaslu in Implementing Supervision and Enforcement of General Election Criminal Law Violations (Study of Decision Number 17/Pid.Sus/2019/PN Amlapura). The objectives of this study are (1) To find out how Bawaslu's role is in preventing violations of the code of ethics and neutrality (2) To find out how the mechanism of the process of handling violations of the code of ethics related to the neutrality of village heads in Karangasem Regency through Bawaslu's supervisory function. This study is a descriptive empirical legal study using primary data through research by means of observation and interviews and also using secondary data using certain laws and documents. The results of the study obtained are (1) The Election Supervisory Body (Bawaslu) has a very important role, this is because Bawaslu is a crucial pillar in the election administration system in Indonesia. Bawaslu ensures that the election process runs according to democratic, fair and transparent principles through systematic supervision of ASN neutrality and election participants' compliance with the code of ethics (2) Bawaslu has new authority as an election supervisory institution to resolve administrative violations and disputes related to TSM (Structured, Systematic and Massive) violations which can administratively cancel candidacy through an adjudication hearing process.

Keywords: *Bawaslu, Supervision, Criminal Violations and Code of Ethics.*